



Buletin Parlementaria

Nomor 1101/IV/IV/2020 • April 2020

Serahkan Bantuan Sembako, DPR Minta Warga Tunda Mudik



DPR-RI
Media Center



9 772614 339005



7 Ombudsman Diminta Optimal Lakukan Pengawasan Maladministrasi



11 Kemenhub Harus Segera Jabarkan Protokol Larangan Mudik



Foto bersama Pimpinan DPR RI, Pimpinan BURT DPR RI, dan Pimpinan AKD DPR RI usai penyerahan bantuan sembako kepada karyawan di Kompleks Parlemen. Foto: Eno/MAN

Serahkan Bantuan Sembako, DPR Minta Warga Tunda Mudik

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta agar segenap masyarakat untuk sementara waktu menunda mudik Lebaran tahun ini guna mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Puan memahami, di satu sisi larangan mudik sangat memberatkan masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun, menurut Puan, di sisi lainnya menunda mudik akan mengurangi penyebaran pandemi Covid-19 ke daerah-daerah. Mengingat, status wilayah-wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sebagai zona merah Covid-19.

“Saya tahu, betapa berharganya untuk dapat bersilaturahmi menemui orang tua dan sanak saudara. Tetapi, ketika kita melakukan mudik di tengah pandemi Covid-19, maka artinya kita memperbesar risiko menularkan virus Covid-19 kepada orang-orang yang kita cintai. Sebab, mungkin saja kita terlihat sehat tapi bisa saja kita sebenarnya membawa virus Corona

dan tanpa sadar dapat menularkannya kepada orang-orang yang kita temui saat mudik,” ujar Puan saat penyerahan bantuan sembako kepada karyawan dan masyarakat sekitar Kompleks Parlemen, di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4).

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, pemberian bantuan sembako tersebut sebagai bentuk solidaritas sosial yang sangat dibutuhkan semua komponen masyarakat. “Di saat-saat seperti inilah, sangat dibutuhkan adanya gotong royong kita semua. Pimpinan DPR RI mengajak agar seluruh elemen masyarakat terus menjalankan semangat gotong royong,” tegas Puan. Bantuan 9 ribu paket sembako ini merupakan kerja sama DPR RI dengan Bank Bukopin.

Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, Puan mengapresiasi sejumlah Bantuan Sosial (Bansos) yang sudah dibagikan dan sedang disiapkan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi warga yang terdampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Insentif seperti itu sangat penting agar masyarakat tenang tinggal di rumah mematuhi anjuran PSBB,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah V itu lebih lanjut.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Direktur Utama Bank Bukopin Eko Rahmansyah Gindo, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, serta pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI. Saat penyerahan bantuan ini, baik Pimpinan DPR RI maupun pihak-pihak yang menerima bantuan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. ■ pun/sf

Sektor Usaha Rakyat Perlu Intervensi BUMN

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menegaskan sektor usaha yang digerakkan rakyat, perlu mendapat intervensi dan perlakuan khusus agar stabilitas perekonomian nasional bisa tetap terjaga.

“Salah satunya, adalah menerapkan kemitraan dan kemudahan akses ke sumber modal maupun bantuan program stimulus yang melibatkan berbagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” tegas Rachmat saat rapat virtual Komisi VII DPR RI dengan Direksi Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN), baru-baru ini.

Dijelaskannya, wabah Covid-19 berdampak kepada perekonomian nasional bahkan perekonomian dunia. Sejumlah sektor usaha yang menjadi

domain bisnis BUMN pun ikut terpengaruh. Sehingga dibutuhkan tindakan nyata agar BUMN tetap berkontribusi nyata dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini.

“Butuh terobosan yang antisipatif untuk menjaga BUMN tetap *survive*, sekaligus ikut berkontribusi membantu Pemerintah dalam situasi sulit akibat wabah ini,” tambah politisi daerah pemilihan Gorontalo itu.

Rapat virtual tersebut bertujuan untuk mengevaluasi geliat bisnis kedua BUMN (Pertamina dan PGN) di tengah pandemi Covid-19, serta merumuskan beberapa langkah konkret BUMN. Salah satunya melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk melindungi sektor usaha kecil menengah yang menjadi komoditas utama usaha rakyat Indonesia. ■ **ayu/es**



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel. Foto: Jaka/MAN



Serahkan Bantuan Sembako, DPR Minta Warga Tunda Mudik

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Pumtho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie.

ANALIS MEDIA

Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natallo, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Sugiyanto, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Puan Maharani Serukan Solidaritas Internasional Atasi Pandemi Covid-19



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Kresno/MAN

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyerukan panggilan kemanusiaan dan kerja sama internasional, terutama bagi para anggota parlemen dunia dalam menangani pandemi virus Corona (Covid-19). Hal tersebut disampaikannya dalam pidato pembukaan Diskusi Panel bertajuk *International Cooperation To Defeat Covid-19* yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Kerja Sama Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Selasa (21/4).

“Kita para wakil rakyat mendapatkan panggilan kemanusiaan untuk membantu rakyat kita dengan menghadirkan solusi yang nyata dalam menangani pandemi Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya,” ungkap

Puan, sapaan Ketua DPR RI, dalam *video conference* yang disampaikan dalam bahasa Inggris tersebut.

Diskusi panel yang diikuti seluruh parlemen dunia anggota Komite Kerja Sama Antar Parlemen ini, diisi oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon sebagai *key speakers* dan sejumlah pembicara kunci lainnya, diantaranya Perwakilan WHO Indonesia Navaratnasamy Paranietharan, Juru Bicara Parlemen Malaysia Dato Muhamad Rashid Hasnon, Ketua Komite Luar Negeri Majelis Nasional Vietnam Nguyen Van Giau serta Wakil Ketua BKSAP DPR RI Charles Honoris selaku moderator.

Peserta diskusi virtual (BKSAP Webinar) ini mendengarkan langkah-langkah Korea Selatan dalam menangani pandemi virus Corona yang disampaikan oleh Kepala Komite Khusus Coronavirus Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin Pyo. Kemudian Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Alphyanto Ruddyard juga menyampaikan paparannya. Terakhir, peserta juga mendengarkan pesan dari Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB Untuk Asia Pasifik (UN ESCAP) Armida Alisjahbana.

Terkait hal ini, Puan menyatakan panggilan kemanusiaan bangsa-bangsa dalam melawan Covid-19 bisa dimulai dengan mengaktifkan semangat kekeluargaan bangsa-bangsa seperti semangat yang diutarakan 75 tahun yang lalu oleh Presiden Soekarno.

“Dunia memang sedang menjalani *physical distancing*, tapi jangan sampai terjadi *nations distancing* atau antar bangsa menjaga jarak. Justru yang dibutuhkan dunia saat ini adalah *nations uniting* atau bangsa-bangsa bersatu untuk melawan musuh bersama kita yaitu Covid-19,” tegas cucu Proklamator Republik Indonesia ini.

Puan menegaskan kembali pernyataannya ketika berbicara di depan Grup Kerja sama Bilateral dengan Parlemen Negara Sahabat di Jakarta Februari lalu bahwa Virus Corona atau Covid-19 bukanlah persoalan atau tanggung jawab satu atau dua negara saja melainkan persoalan yang perlu diselesaikan bersama-sama oleh semua kelompok masyarakat dunia.

“Dan hari ini kita melihat bahwa lebih dari 200 negara sedang berjuang melawan pandemi Covid-19. Semua negara menghadapi situasi sulit baik dari sisi keselamatan dan kesehatan manusia, dampak perekonomian, dampak sosial, dan juga kesejahteraan masyarakat,” papar Puan.

Karena itu, Puan berharap BKSAP Webinar ini dapat menjadi salah satu akselerator terjadinya gotong royong dunia, termasuk gotong royong parlemen dunia dalam melawan Covid-19. “Mari kita bertukar informasi, data, pengalaman, dan praktik terbaik untuk menghadirkan solusi nyata dalam menyelamatkan rakyat dunia dari virus Corona,” pungkas politisi PDI-Perjuangan ini. ■ alw/es

Timwas DPR-Gubernur Jakarta Sepakat **Perkuat** Pelaksanaan PSBB

Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Bencana DPR RI menggelar rapat secara virtual dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (16/4). Rapat tersebut membahas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta dan integrasi pelaksanaannya dengan PSBB di Jawa Barat dan Banten. Pada rapat itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar selaku Ketua Timwas Penanggulangan Bencana DPR RI menyatakan Timwas DPR RI sepakat untuk memperkuat pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta.

“Salah satu upaya mewujudkan tujuan memperkuat pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta tersebut adalah dengan cara melakukan sosialisasi dengan skala lebih luas. Sosialisasi harus dijalankan dengan melibatkan masyarakat luas dan perlu disertai sanksi tegas terhadap pelanggar ketentuan PSBB,” ujar Muhaimin saat memimpin rapat.

Dalam rapat tersebut, Timwas DPR RI dengan Gubernur DKI Jakarta juga membahas dampak ekonomi dan sosial yang disebabkan PSBB yang merupakan upaya membatasi penyebaran Covid-19. Untuk itu, kata Muhaimin, dibutuhkan pendekatan dan penanganan yang sifatnya terpadu dan menyeluruh. “Penanganan masalah kesehatan harus dilakukan secara bersamaan dengan penanganan di bidang ekonomi dan sosial.

Muhaimin juga mendorong Gubernur DKI untuk terus berupaya meningkatkan kapasitas tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) bagi masyarakat. Peningkatan kapasitas pemeriksaan tes PCR tersebut diperlukan untuk memudahkan proses mitigasi dan upaya isolasi bagi mereka yang

dinyatakan positif terjangkit Covid-19 dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Sehingga tes PCR harus dilakukan secara cepat dan masif.

Kapasitas tenaga dan peralatan kesehatan juga perlu ditingkatkan. Seiring makin bertambahnya jumlah pengidap Covid-19, otomatis membutuhkan penambahan jumlah fasilitas kesehatan termasuk Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar WHO. “Serta, DKI Jakarta perlu melibatkan lebih banyak lagi rumah sakit swasta dalam menerima dan melayani pasien Covid-19,” papar politisi PKB itu. Gubernur DKI Jakarta juga diminta menyiapkan strategi lain baik dari aspek pengobatan bagi masyarakat andaikata pandemi Covid-19 berlangsung lama.

Rapat yang digelar virtual itu juga diikuti oleh sejumlah Anggota DPR RI yang tergabung dalam Timwas Penanggulangan Bencana DPR RI, di antaranya Mufti Anam, Sadarestuwati, Diah Pitaloka, dan Selly Andriany Gantina dari F-PDI Perjuangan,

Hamka B. Kady, John Kennedy Azis, Dewi Asmara, dan Muhidin Mohamad Said dari F-Golkar, serta Sodik Mudjahid (F-Gerindra).

Selanjutnya hadir Lisda Hendrajoni (F-NasDem), Cucun Ahmad Syamsurijal, Siti Mukaromah (F-PKB), Nanang Samodra dan Guntur Sasono dari F-Demokrat, Ali Taher (F-PAN) dan Nurhayati Monoarfa (F-PPP). Turut hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik, Ahmad Riza Patria.

■ pun/es



Wakil Ketua DPR RI
Muhaimin Iskandar.
Foto: Jaka/MAN

Komisi I Dukung Dewan Pers Lindungi Jurnalis saat Peliputan Covid-19

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi kebijakan Dewan Pers dan sejumlah Organisasi Jurnalis yang mengeluarkan Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan Covid-19 bagi jurnalis agar lebih mengutamakan perlindungan kesehatan dan keselamatan dirinya dalam peliputan. Hal itu juga menjadi kesimpulan RDP secara virtual Komisi I DPR RI dengan jajaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

“Komisi I DPR RI mendorong Dewan Pers dengan Konstituen Dewan Pers agar secara aktif dan berkelanjutan, melindungi tugas jurnalis dalam rangka menjaga keamanan kerja saat melakukan peliputan selama pandemi Covid-19 demi keberlangsungan eksistensi perusahaan pers,” jelas Kharis dalam rapat itu, Senin (20/4).

”

MENDORONG DEWAN PERS DENGAN KONSTITUEN DEWAN PERS AGAR SECARA AKTIF DAN BERKELANJUTAN, MELINDUNGI TUGAS JURNALIS DALAM RANGKA MENJAGA KEAMANAN KERJA SAAT MELAKUKAN PELIPUTAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DEMI KEBERLANGSUNGAN EKSISTENSI PERUSAHAAN PERS

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti langkah Dewan Pers untuk mengoptimalkan imbauan kepada media massa agar tetap memperhatikan Kode Etik Jurnalistik saat melakukan peliputan terkait Covid-19 harus dikedepankan, sehingga tetap menjaga kerahasiaan korban atau pasien Covid-19.

“Belajar dari kasus awal Covid-19, Dewan Pers dan sejumlah organisasi wartawan telah meminta dan mengingatkan jurnalis dan pemilik media agar berhati-hati dan tidak memuat identitas pasien, di samping itu juga lebih selektif dalam memilih pakar yang kompeten sebagai nara sumber sehingga tidak menyebabkan kelengahan dan keresahan publik,” sambung Kharis lebih lanjut.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
Foto: Jaka/MAN

Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah V ini juga meminta Komisi Penyiaran Pusat yang juga hadir dalam RDP virtual tersebut, agar terus mensosialisasikan kepada lembaga penyiaran untuk menayangkan konten siaran yang berkualitas dan imbauan positif agar publik tercerahkan, selalu berfikir positif dan waspada.

“Saya kira kita bersama harus mendorong KPI Pusat agar mensosialisasikan kepada Lembaga Penyiaran untuk memperbanyak konten pendidikan dan siaran ramah anak, iklan layanan masyarakat dan iklan niaga bermuatan pesan pencegahan Covid-19, referensi tayangan berkualitas dan imbauan pola hidup sehat,” saran Kharis.

■ ann/sf



Ombudsman Diminta Optimal Lakukan Pengawasan Maladministrasi

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta jajaran Ombudsman RI agar tetap optimal melakukan pengawasan maladministrasi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Saya berharap Ombudsman RI tetap optimal melakukan pengawasan terhadap maladministrasi pada jajaran pemerintahan dan juga ASN untuk menjaga pelayanan publik agar lebih optimal,” kata Mardani dalam berita rilisnya kepada *Parlementaria*, Rabu (22/4).

Lebih lanjut, Mardani juga meminta Ombudsman RI untuk mengawasi anggaran sebesar Rp 405,1 triliun penanggulangan dampak wabah Covid-19. Ombudsman harus serius melakukan pengawasan distribusi dan penggunaan dana bencana ini agar tepat sasaran dan tepat guna.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI itu mengimbau agar Ombudsman mengawasi titik-titik rawan maladministrasi itu. “Ombudsman pusat dan perwakilan harus melakukan pengawasan betul titik potensi korupsi dan penyalahgunaan dana bencana ini,” ucap Mardani lebih lanjut.

Politisi Fraksi PKS tersebut meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk transparan dan pengelolaannya akuntabel dalam menyalurkan dana penanganan pandemi Covid-19. “Harus terbuka jalankan SOP. Melakukan pelayanan



Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto: Jaka/MAN

”

MELAKUKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK JSTRU KETIKA KONDISI SEPerti INI, JANGAN SAMPAI KARENA PERILAKU SEGELINTIR ORANG JADI PENYEBAB MAKIN LAMA VIRUS INI BERTAHAN

publik yang lebih baik justru ketika kondisi seperti ini, jangan sampai karena perilaku segelintir orang jadi penyebab makin lama virus ini bertahan,” tuturnya.

Seperti dikabarkan, Indonesian Corruption Watch (ICW) melansir bahwa selama sepuluh tahun terakhir terdapat sedikitnya 87 kasus korupsi dana bencana yang telah ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW mengatakan titik rawan korupsi dana bantuan bencana terletak pada tahapan tanggap darurat, rehabilitasi dan pemulihan atau rekonstruksi lokasi bencana.

■ dep/es

Tindak Tegas Begal Jalanan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni merasa prihatin melihat kejahatan begal yang semakin nekat bahkan telah mengalami peningkatan dalam beberapa waktu di beberapa daerah. Hal ini terjadi seiring dengan diberlakukannya masa Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di sejumlah daerah, sehingga kondisi jalan yang sepi karena mayoritas masyarakat tinggal di rumah masing-masing.

Ia pun menandakan kepada Kepolisian agar tidak ragu-ragu untuk memberikan sanksi hukuman tegas para pelaku kriminal di masa pandemi. "Saya mendukung polisi untuk mengambil tindakan tegas. Masalahnya mereka bawa senjata tajam, terus terkenal sadis dalam melakukan aksinya, jadi kalau memang ketahuan dan kabur, ya kalau perlu tembak di tempat, ditembak saja," tegas Sahroni dalam keterangan persnya kepada *Parlementaria*, Senin (20/4).

Sahroni menyampaikan tindakan tegas aparat Kepolisian terhadap pelaku begal perlu dilakukan, agar memberi efek jera kepada kawan begal lainnya yang

berniat untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Pasalnya kejadian ini sudah meresahkan masyarakat, bahkan memperkeruh keadaan di masa pandemi Covid-19.

"Saya mendukung sikap kepolisian yang berani menindak tegas para pelaku pembegalan langsung di tempat. Hal ini diperlukan untuk menjamin munculnya rasa aman di masyarakat," saran Sahroni lebih lanjut. Politisi Fraksi

Partai NasDem ini juga meminta jajaran Kepolisian memprioritaskan keamanan di lingkungan pemukiman masyarakat dan lokasi-lokasi yang dirasa rawan kejahatan.

Di masa penerapan PSBB keberadaan pelaku begal, dan tindakan kriminal lainnya sudah sangat meresahkan. Sahroni pun mengingatkan masyarakat agar selalu waspada, terutama jika sedang dalam perjalanan. Dia menegaskan bahwa tindak kriminal seperti begal bisa terjadi di mana saja dan mengancam siapa saja.

Sahroni pun menyarankan kepada masyarakat untuk tetap di rumah saja, tidak keluar kecuali dalam kebutuhan sangat mendesak. "Kalau bisa sih di rumah saja dulu, tapi kalau memang ada keperluan mendesak hingga harus ke luar rumah, mohon untuk selalu waspada," imbuah legislator dapil DKI Jakarta III itu.

■ eko/sf

Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Ahmad Sahroni. Foto: Oj/Man



KKP Diminta Laksanakan Program Strategis Percepatan Pemulihan Ekonomi



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. Foto: Arief/AMAN

Komisi IV DPR RI meminta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera melaksanakan program strategis dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 di sektor kelautan dan perikanan, sehingga dapat langsung dirasakan oleh pelaku utama perikanan, baik nelayan, pembudi daya ikan petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat membacakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo beserta jajaran yang

dilakukan secara virtual, Rabu (22/4).

Menurut politisi Partai Golkar itu, salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat menyerap atau mengambil produksi komoditas perikanan dan komoditas perikanan hasil masyarakat.

“KKP perlu segera berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, agar menugaskan Perum Perindo, PT. Perinus (Persero), PT. Garam (Persero), dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) untuk dapat menyerap atau mengambil produksi komoditas perikanan dan komoditas perikanan hasil masyarakat,” katanya.

Menurut legislator dapil Jawa Barat

”

KITA HARUS MASUK ADA PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT. PAK MENTERI BISA BERKOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN YANG MENANGANI BANTUAN PEMERINTAH AGAR SALAH SATU ITEM DALAM BANTUAN SOSIAL BISA MEMASUKAN PRODUK PERIKANAN

VII itu, di masa pandemi Covid-19 ini sektor kelautan merupakan sektor strategis yang dapat menyelamatkan Indonesia dalam hal pemenuhan bahan pokok. Untuk itu, menurutnya diperlukan kebijakan negara untuk menyerap dan membagikan kepada masyarakat terdampak.

Senada, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono meminta KPP berkoordinasi dengan BUMN untuk membeli hasil nelayan, pasalnya saat ini ada permintaan yang menurun dari ekspor ikan. “Kita harus masuk ada pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat. Pak Menteri bisa berkoordinasi dengan kementerian yang menangani bantuan pemerintah agar salah satu item dalam bantuan sosial bisa memasukan produk perikanan. ini akan sangat membantu nelayan dan budi daya ikan,” kata politisi PDI-Perjuangan itu. ■ rnm/sf

Realokasi Anggaran Kementerian Diminta Prioritaskan Program Padat Karya dan Bansos



Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Foto: Eno/MAN

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT) agar dalam *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran masing-masing untuk memprioritaskan program Padat Karya Tunai dan bantuan sosial kepada masyarakat luas yang terimbas pandemi Covid-19. Tujuannya, dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Hal ini termaktub dalam poin kesimpulan rapat yang dibacakan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PD TT) Abdul Halim Iskandar, Selasa (21/4).

Rapat kerja yang diselenggarakan secara virtual itu membahas realisasi anggaran sampai dengan bulan Maret 2020 serta realokasi anggaran



REALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN MITRA KERJA KOMISI V DPR RI TAHUN ANGGARAN 2020 TERKAIT DENGAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

kementerian mitra kerja Komisi V DPR RI Tahun Anggaran 2020 terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.

Komisi V DPR RI juga meminta Kemenhub, Kementerian PUPR dan Kemendes PD TT untuk mengevaluasi dan mempertajam kembali rincian *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran per masing-masing Eselon I sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 54 tahun 2020 serta Surat Edaran Menkeu No. S-302/MK.02/2020 mengenai Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020.

Komisi V DPR RI sepakat dengan Kemenhub, Kementerian PUPR dan Kemendes PD TT untuk melanjutkan pembahasan bersama pada rapat berikutnya berdasarkan penyampaian perkembangan penganggaran dari tiap Kementerian. “Masukan dan saran dari Komisi V DPR RI untuk disampaikan dan dibahas bersama dalam Rapat Komisi V DPR RI di waktu yang akan datang,” pungkas Lasarus.

■ pun/es

Kemenhub Harus Segera Jabarkan Protokol Larangan Mudik

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengusulkan

Kementerian Perhubungan segera menjabarkan protokol larangan mudik yang terkoordinasi sampai ke tingkat bawah. Penjabaran tersebut mendesak untuk dilaksanakan seiring dengan terbitnya keputusan Presiden Joko Widodo yang secara resmi melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik tanpa terkecuali.

Hal tersebut disampaikan Syarif saat mengikuti Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang digelar secara virtual, Selasa (21/4).

“Saya kira, keputusan dari Presiden untuk melarang mudik perlu adanya penjabaran yang terkoordinasi sampai ke tingkat bawah baik dari Kepolisian maupun Kemenhub agar berjalan efektif dan dipatuhi. Saya mengusulkan, harus ada sanksi bagi yang melanggar larangan mudik tersebut. Karena, dalam upaya mengatasi penyebaran Covid-19 ini adalah dengan mengurangi interaksi antara manusia satu dengan lainnya,” ujar Syarif.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menuturkan, jika sampai terjadi arus mudik yang begitu besar, apalagi dari zona merah ke daerah-daerah yang belum terlalu rawan, dikhawatirkan terjadinya penularan dan akan susah

”

KEPUTUSAN DARI PRESIDEN UNTUK MELARANG MUDIK MAKA PERLU ADANYA PENJABARAN DAN TERKOORDINASI SAMPAI KE TINGKAT BAWAH BAIK DARI KEPOLISIAN MAUPUN KEMENHUB AGAR BERJALAN EFEKTIF DAN DIPATUHI

untuk diatasi. Sebagaimana diketahui, di berbagai daerah fasilitas kesehatan, ketersediaan alat pelindung diri (APD), dan sebagainya masih sangat terbatas.

“Terus terang saja, contohnya seperti di daerah Kalimantan Barat yang tadinya (pasien) masih landai, ternyata kemarin sudah ada peningkatan orang yang terdampak Covid-19 mencapai 100 persen. Nah, ini tentu menjadi harapan kita bagaimana keputusan Presiden yang melarang mudik tersebut betul-betul bisa dijabarkan sehingga ini bisa efektif,” pungkas legislator

dakil Kalimantan Barat
itu. ■ pun/es



Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Syarif Abdullah Alkadrie.
Foto: Jaka/MAN

Komisi VI Minta Kemendag Tingkatkan Pengawasan Perdagangan *Online*

Komisi VI DPR RI meminta Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk terus melakukan pengawasan terhadap transaksi *online*. Serta, mendorong Kemendag agar secepatnya membuat Permendag yang membuat Prosedur Operasi Standar (SOP), juklak dan juknis perdagangan transaksi *online*. Sehingga, perdagangan *online* memiliki landasan hukum yang kuat dan melindungi hak-hak penjual dan pembeli dengan memperhatikan kondisi di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu termaktub dalam poin kesimpulan rapat yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemendag RI yang digelar secara virtual, Rabu (22/4).

“Dalam kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI juga meminta Kementerian Perdagangan RI untuk mengefektifkan dan meningkatkan sosialisasi tentang informasi berbagai *hotline* bagi masyarakat yang memiliki keluhan

terkait pelayanan perdagangan dan perlindungan konsumen,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Tak hanya itu, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk menjalankan dengan efektif anggaran dan program Kementerian yang telah melewati proses realokasi dan *refocusing* anggaran serta menitikberatkan kinerja pada kebijakan perdagangan yang dirasakan langsung ke masyarakat dalam rangka memaksimalkan keterbatasan anggaran Kementerian untuk menghadapi pandemi Covid-19.

“Komisi VI juga meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag untuk menginformasikan daftar penerima bantuan. Serta, bantuan apa saja yang diberikan kepada

pasar-pasar tradisional dalam kaitan menghadapi pandemi Covid-19,” tandas Hekal. Komisi VI DPR RI meminta Sekjen Kemendag untuk menata kembali anggaran rutin dalam rangka penghematan anggaran. Agar, tercipta postur anggaran yang lebih efektif, efisien dan akuntabel di tengah pandemi Covid-19 dengan mengedepankan tugas pokok dan program prioritas. ■ epunr/sf



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal. Foto: Arief/MAN

Komisi VI Usul Penambahan Struktur Baru Kemenkop UKM

Pandemi Covid-19 patut dianggap sebagai sebuah tolok ukur bagaimana Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) bisa berintrospeksi dan mencari tahu titik-titik kelemahan mana yang belum dipahami bersama mengenai koperasi dan UKM. Mengacu kepada tugas Kemenkop UKM di dalam pandemi ini kebutuhan akan kelengkapan pendataan menjadi momok yang harus segera diselesaikan sehingga dibutuhkan struktur khusus di dalam tubuh Kemenkop UKM.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Gilang Dhiela Fararez dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan para Deputi dari Kementerian Koperasi dan UKM, Dirut PT. Permodalan Nasional Madani, serta Dirut LPDB secara virtual, pada Rabu (22/4). Gilang pun mewakili Fraksi PDI-Perjuangan meminta ada penambahan struktur baru setingkat deputi di tubuh Kemenkop UKM.

"Jadi saya harapkan di sini para deputi yang hadir di sini untuk bisa menangkap pesan ini dan agar kita bisa meninggalkan *legacy* yang baik ke depan. Dalam hal ini kami fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar ada perubahan harus dimulai dari upaya reorganisasi sekaligus revitalisasi kemenkopukm antara lain dengan menambahkan deputi baru yaitu deputi data dan revitalisasi," terangnya.

Gilang menjelaskan pentingnya kebutuhan data dan ahli riset guna melakukan pendataan menyeluruh terhadap jumlah koperasi dan UKM yang selama ini tidak terdata. Menurutnya hal ini bisa dilaksanakan secepatnya namun dalam urusan pembiayaan dan semacamnya bisa



Anggota Komisi VI DPR RI Gilang Dhiela Fararez. Foto: Andri/MAN

diselesaikan ketika pandemi Covid-19 ini berakhir.

"Tanpa data apapun yang kita kerjakan akan sulit tercapai, untuk itu pembenahan harus segera dilakukan. Soal pendataan bagi koperasi dan umkm ini harus menjadi bagian dari reformasi total kita terhadap sektor usaha rakyat. Namun jika dalam rangka Covid-19 masih memungkinkan diperbaiki tetapi urusan pembiayaan dan lainnya, ada baiknya dilakukan pasca pandemi ini," ujarnya.

Mengenai usulan ini, Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK dari Fraksi PKS mengaku setuju dengan hal tersebut apabila pembahasan dilakukan dalam jangka panjang. Namun mengacu kepada penyelesaian Covid-19 saat ini menurutnya yang harus segera dilakukan adalah pemaksimalan kerja antar instansi. Perlu dibentuk semacam

task force yang dapat menjembatani komunikasi dan koordinasi kerja antara instansi.

"Karena ada kenyataan di lapangan pertama masih banyak pelaku UMKM yang masih tidak mengetahui prosedur pengajuan bagaimana mendapatkan program-program stimulus yang menjadi kebijakan pemerintah. Mereka selama ini tidak tahu cara mengajukannya dan harus kemana mengajukannya. Itu tentu perlu penanganan tersendiri, perlu sosialisasi yang lebih masif," imbuhnya.

Amin menambahkan bahwa fungsi lain dari *task force* adalah agar tidak terjadi duplikasi data. "Sementara yang lainnya keterjangkauannya orang-orang yang berhak itu bisa mendapatkan hak yang sebenar-benarnya dan menghindari pelaku usaha dari mispersepsi terhadap program-program pemerintah," tukasnya. ■ **er/sf**

Perhitungan Rasio Elektrifikasi PLN dengan Fakta di Lapangan Berbeda

Anggota Komisi VII DPR RI Arkanata Akram menyampaikan bahwa ada perbedaan perhitungan rasio elektrifikasi antara PLN pusat dengan yang ada di lapangan. Dikatakannya, pada rapat Komisi VII sebelumnya dengan PT. PLN (Persero), Dirut PLN sempat menyebutkan rasio elektrifikasi listrik di Kalimantan Utara tahun 2019 adalah 94 persen. Namun

“Saya melihat ada perhitungan elektrifikasi yang berbeda antara PLN pusat dengan yang ada di lapangan. Data di PLN pusat, mereka menghitung elektrifikasi di desa (dengan pola) ketika satu rumah mendapat jaringan listrik maka desa tersebut sudah disebut sebagai desa terelektifikasi. Padahal hal ini tidak adil,” tandas Arkanata saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT. PLN (Persero) beserta jajaran, Rabu (22/4).

Menurut politisi Partai NasDem itu, hal tersebut bisa menimbulkan sebuah *miss information*. Jika ada investor yang tertarik untuk menanamkan sahamnya di daerah seperti dimaksud maka apabila kenyataan data di lapangannya berbeda, maka dampaknya akan berbahaya sekali.

“Jika kita ingin menyebut suatu desa sudah terelektifikasi maka minimal 50 persen dari KK yang ada di desa tersebut (sudah) mendapatkan listrik,” ujarnya. Legislator dapil Kalimantan Timur itu juga menyatakan, bila melihat kenyataan di lapangan, rasio daerah yang terelektifikasi tidak mencapai 97 persen akan tetapi hanya mencapai 66 persen saja. ■ dep/es

”

DATA DI PLN PUSAT, MEREKA MENGHITUNG ELEKTRIFIKASI DI DESA (DENGAN POLA) KETIKA SATU RUMAH MENDAPAT JARINGAN LISTRIK MAKA DESA TERSEBUT SUDAH DISEBUT SEBAGAI DESA TERELEKTRIFIKASI. PADAHAL HAL INI TIDAK ADIL

kenyataannya di lapangan jika menggunakan rasio dengan berdasar menggunakan Kartu Keluarga (KK) masyarakat yang ada di sana, maka hanya 77,74 persen, artinya ada selisih hampir 17 persen lebih.



Anggota Komisi VII DPR RI
Arkanata Akram.
Foto: Azka/MAN

Kebijakan Penyelenggaraan Haji 2020 Harus Diputuskan Bulan Ramadan



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Andri/MAN

Kementerian Agama RI telah membuat tiga skenario penyelenggaraan Haji 2020 dalam menghadapi Covid-19 saat ini. Pertama, Haji tetap dilaksanakan dengan kuota normal. Kedua, Haji tetap dilaksanakan dengan pembatasan kuota. Ketiga, Haji dibatalkan sama sekali. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebut jika keputusan penyelenggaraan ibadah Haji jangan menunggu kebijakan Pemerintah Arab Saudi saja, tetapi juga kesiapan Pemerintah Indonesia.

Skenario penyelenggaraan Haji

2020 tersebut dibahas dalam RDP virtual antara Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Rabu (15/4). "Terkait Covid-19, kita tidak bisa menunggu kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Tetapi juga harus memperhatikan kesiapan Pemerintah kita sendiri. Apakah calon jemaah Haji sudah bebas Covid-19," ujar Ace.

Politisi Partai Golkar itu mencontohkan dalam kasus penyelenggaraan Umrah. Saat itu di Indonesia belum ada orang yang positif Covid-19. Tetapi, Pemerintah

”

TIDAK SEMATA-MATA MEMBUAT SKENARIO. PALING LAMBAT PERTENGAHAN RAMADAN SUDAH HARUS DIPUTUSKAN

Arab Saudi memutuskan untuk menyetop umrah. Selanjutnya Ace menambahkan bahwa mayoritas jemaah Haji Indonesia adalah berusia 50 tahun ke atas. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia harus memperhatikan kesiapan jemaah karena orang dengan usia lanjut rentan terkena Covid-19.

Ace meminta agar Pemerintah Indonesia paling lambat memutuskan kebijakan penyelenggaraan Haji pada pertengahan bulan puasa nanti. "Tidak semata-mata membuat skenario. Paling lambat pertengahan Ramadan sudah harus diputuskan," kata Ace. Menurutnya, dalam memutuskan kebijakan Haji, Kemenag perlu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sedangkan berkenaan dengan penanganan Covid-19 yang dilakukan BPKH, Ace mengapresiasi dan meminta agar hal tersebut dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. "Ini supaya dalam satu kendali karena, untuk diketahui, gugus tugas sudah punya standar pengadaan APD, Ventilator dan lainnya," pungkas legislator dapil Jawa Barat II itu. ■ hs/sf

BKKBN Diminta Perhatikan Kelompok Rentan Selama Pandemi Covid-19

Komisi IX DPR RI meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI mendukung adanya *refocusing* anggaran untuk pelaksanaan program pemenuhan gizi yang konkrit dan masif bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu melahirkan, balita, anak usia sekolah dan orang lanjut usia pada masa pandemi Covid-19.



KELOMPOK ORANG DENGAN RISIKO TINGGI TERPAPAR VIRUS CORONA HARUS MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS DARI PEMERINTAH

Hal itu menjadi salah satu poin kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan secara virtual antara Komisi IX DPR RI dengan BKKBN dan Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Selasa (21/4).

Menurutnya, salah satu cara agar terhindar dari Covid-19 adalah menjaga imunitas tubuh. Untuk itu pemenuhan gizi yang konkrit dan masif perlu dilakukan terutama pada kelompok rentan. “Kelompok orang



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu. Foto: Jaka/MAN

dengan risiko tinggi terpapar virus Corona harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah,” ungkap politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Pendapat yang sama juga diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Anas Tahir. Ia meminta Pemerintah memberikan perlindungan bagi kelompok rentan di masa Covid-19. “Di masa Covid-19 Pemerintah perlu mengantisipasi terpapar Covid-19 pada lansia, ibu hamil dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, pemetaan kelompok rentang juga perlu dilakukan di daerah-daerah,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), presentasi lansia Indonesia meningkat 2 kali lipat menjadi 9,5 persen atau sekitar

25 juta jiwa. Tahun 2019 sudah ada 5 Provinsi yang memiliki struktur penduduk tua, dimana penduduk lansia mencapai 10 persen. Ia mencontohkan, penduduk lansia di Yogyakarta mencapai 14,50 persen, Jawa Tengah 13,36 persen, Jawa Timur 12,96 persen, Bali 11,30 persen.

Sebelumnya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan pada tahun 2020 Pagu Anggaran BKKBN sebesar Rp 3 triliun. Namun, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 telag ditetapkan bahwa alokasi anggaran BKKBN harus di-*refocusing*. “Karena ada Peraturan Pemerintah anggaran BKKBN di-*refocusing* sebesar Rp 408 miliar dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19),” pungkasnya. ■ rmm/es

Cegah DBD, Gerakan 3M Plus Harus Digaungkan

Tingginya curah hujan terutama di wilayah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD) dikhawatirkan akan semakin memudahkan nyamuk *Aedes Aegypti* berkembang biak. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi penyebaran DBD. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa yang perlu dilakukan Pemerintah ialah mengedepankan preventif dan terus mensosialisasi gerakan menguras, menutup dan mendaur ulang (3M) Plus cara lain kegiatan pencegahan DBD.

“Gerakan 3M Plus perlu terus digaungkan, agar masyarakat melakukan imbauan tersebut, mulai dari menguras tempat-tempat penampungan air seminggu sekali, menutup rapat tempat-tempat penampungan air dan mengubur barang-barang bekas yang bisa menampung air yang dapat dijadikan sebagai wadah bertelurnya nyamuk DBD,” katanya melalui berita rilis, Senin (20/4).

”

MARI KITA GERAKKAN DALAM KELUARGA SETIDAKNYA SATU JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK) INI MERUPAKAN KEPEDULIAN MASING-MASING KELUARGA UNTUK TURUT ANDIL DALAM PENCEGAHAN DBD

Sani menyampaikan, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI 14 April lalu, jumlah kasus DBD di Indonesia mengalami lonjakan drastis sejak awal tahun 2020 yang menembus angka 16 ribu pada periode Januari hingga awal Maret tahun 2020 ini.

Untuk itu, legislator Fraksi Partai Golkar itu juga mengimbau masyarakat melakukan gerakan satu keluarga satu jumentik. “Mari kita gerakan dalam keluarga setidaknya satu juru pemantau jentik (jumentik) ini merupakan kepedulian masing-masing keluarga untuk turut andil dalam pencegahan DBD,” tuturnya.

Politisi dapil Jambi ini juga mengajak masyarakat memantau dan melaporkan jika ada indikasi demam ke arah DBD sehingga bisa segera ditangani dan diobati. “Agar tidak terjadi lonjakan yang luar biasa, kita harus bersama sama menjaga, terapkan 3M Plus,” tutupnya. ■ rmm/es

Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa. Foto: Sof/MAN



Sofyan Tan Prihatin Pemotongan Anggaran Perpustakaan

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengaku prihatin terhadap pemotongan anggaran sebesar 19,1 persen, yakni dari Rp 658,997 miliar dipotong menjadi Rp 106,552 miliar, yang dialami oleh Perpustakaan Nasional oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, anggaran Perpustakaan sangat sedikit, tapi kemudian masih harus dipotong.

“Kami sangat prihatin. Padahal sebagaimana kita tahu, justru di saat mewabahnya Covid-19 ini, dimana kita diwajibkan di rumah saja atau *stay at home*, justru seharusnya Perpustakaan bisa menjadi salah satu penangkal agar orang menjadi lebih nyaman berada di rumah,” ujar Sofyan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan M. Syarif Bando beserta jajaran yang digelar secara virtual, baru-baru ini.

Meski demikian, politisi PDI-Perjuangan ini memberikan apresiasi kepada Perpustakaan yang begitu cepat melakukan adaptasi. Karena

sesungguhnya inilah saatnya Perpustakaan menunjukkan program Perpustakaan *online*/digital yang mulai dikembangkannya. Dengan kata lain, saat inilah kesempatan perpustakaan untuk publikasi. Pasalnya, dengan penduduk hampir 227 juta jiwa, dan tingkat orang terpelajar yang meningkat, maka jumlah pembaca, sejatinya meningkat bukan hanya sebesar 130 persen. Melainkan bisa mencapai 1000 persen.

“Saran saya, bagaimana Perpustakaan bisa sosialisasi lewat semua jaringan yang ada. Bisa melalui program Kemendikbud. Dimana dalam program Kemendikbud disosialisasikan ajakan untuk membaca buku lewat *online* e-Perpustakaan. Selain itu juga bisa menjalin hubungan dengan penerbit. Dimana penerbit bisa menjual bukunya, sekaligus bisa mempublikasikan Perpustakaan,” tambah Sofyan.

Bahkan menurut legislator dari Sumatera Utara I itu, harus ada sayembara mengarang dengan hadiah. Jangan kalah dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memberikan hadiah bagi pemenang lomba senam Covid-19. Intinya, ia dan Anggota Komisi X DPR RI lainnya mendukung penuh realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran Perpustakaan untuk membantu penanganan Covid-19.

■ ayu/sf



Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan. Foto: Andri/MAN

”

KARENA SESUNGGUHNYA INILAH SAATNYA PERPUSNAS MENUNJUKAN PROGRAM PERPUSNAS ONLINE/ DIGITAL YANG MULAI DIKEMBANGKANNYA. DENGAN KATA LAIN, SAAT INILAH KESEMPATAN PERPUSNAS UNTUK PUBLIKASI

Misbakhun Dorong Pemerintah Pusat Berikan Stimulus Lebih Hadapi Krisis



Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun. Foto: Arief/MAN

Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun mendorong Pemerintah untuk memberikan stimulus kepada masyarakat lebih dari yang dianggarkan Pemerintah senilai Rp 405,1 triliun. Sebab, menurut Misbakhun, saat mengikuti rapat belum lama ini dengan Menteri Keuangan, Bank BUMN, Gubernur BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ia menemukan belum terjadinya kalibrasi yang sama antar Kementerian dan Lembaga mengenai besaran krisis yang akan dihadapi Indonesia selama dan usai pandemi Covid-19.

Pemaparan tersebut disampaikan Misbakhun saat mengikuti Agenda 'Ngobrol Santai' bersama Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin dengan tema 'Peran DPR RI dalam Menjaga Stabilitas Hukum dan *Sustainability*

Ekonomi serta Solusi Perusahaan dalam menyikapi Krisis Covid-19' secara virtual, Selasa (14/4). Turut serta dalam agenda tersebut antara lain Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum KADIN Roeslan P. Roeslani, Ketua Umum HIPMI Mardani Maming dan para pemimpin redaksi (pemred) media nasional.

"Saya ingin menyampaikan pandangan dalam forum ini. Bahwa, apa yang dilakukan Pemerintah dengan Rp 405,1 triliun sebagai langkah awal menurut saya ini harus kita dorong Pemerintah untuk memberikan stimulus yang lebih. Karena apa, selaku Anggota Komisi XI DPR RI saya beberapa kali rapat dengan Menteri Keuangan, Bank BUMN, Gubernur BI, OJK dan LPS. Di sana saya menemukan belum terjadinya kalibrasi yang sama sebenarnya seberapa dalam krisis ini," ujar politisi

Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) tersebut.

Lebih lanjut, legislator dapil Jawa Timur II itu berpandangan, krisis yang akan dihadapi di tahun 2020 ini akan lebih berat dibandingkan dengan krisis moneter tahun 1998 dan krisis keuangan pada 2008 lalu. Misbakhun mengingatkan, Indonesia tidak pernah mengalami krisis yang seperti sekarang ini yaitu krisis *pandemic* dimana *supply* dan *demand sector* terkena imbasnya. Terlebih, dengan adanya penerapan *social* atau *physical distancing*.

"Untuk itu, perlu disamakan persepsi *sizing* krisisnya seperti apa. Dari bahan yang ada, apa yang terjadi saat ini akan mengalami situasi lebih dibandingkan Great Depression 1928, 1998, dan 2008. Kalau saat itu hanya sebagian negara yang terkena dampak, sekarang ini total. Karena, kalau sekarang dari sisi *supply* dan *demand*. Saya minta Menkeu benar-benar mengukur, jangan pernah *underestimate* krisis ini," tegas Misbakhun lebih lanjut.

Tak hanya itu, Misbakhun menyoroti analisa Menteri Keuangan bahwa kemungkinan ekonomi Indonesia sudah tidak tumbuh positif tetapi sudah masuk kategori negatif antara 0,3 persen di kuartal kedua nanti sampai -2,6 persen. "Tapi, Menkeu mengatakan nantinya di kuartal keempat akan ada *rebound*. Namun, belum diketahui *rebound*-nya nanti itu akan seperti apa. Maka, saya ingin memastikan bahwa Pemerintah kalau tidak merumuskan stimulus ini sejak awal dalam sebuah paket yang besar maka saya kurang yakin dengan apa yang ditawarkan mengenai *confidence* pasarnya seperti apa," tandas Misbakhun. ■ pun/sf

Setjen DPR **Rakor** dengan MPR dan DPD Bahas Sidang Tahunan



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Foto: Jaka/MAN

Beberapa bulan lagi, Agenda Sidang Bersama DPR-DPD RI, Sidang Tahunan MPR RI, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI akan terselenggara.

Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Setjen MPR RI dan Setjen DPD RI pun mulai melangsungkan rapat perdana untuk membahas dukungan penyelenggaraan agenda tahunan ini.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa tahun ini akan dipersiapkan dua skenario penyelenggaraan, yang pertama menggunakan skenario normal yang biasa digunakan setiap tahunnya dan kedua menggunakan skenario protokol Covid-19 dengan memperhatikan

aturan *physical distancing*.

“Kita akan lihat perkembangannya seperti apa, namun kita tetap mempersiapkan dua skenario dengan persidangan normal, dan menggunakan protokol Covid-19 yang mengikuti aturan memberi jarak, aturan kebersihan, dan sebagainya,” ujarnya ketika ditemui *Parlementaria* usai memimpin rakor bersama dengan Sekjen MPR RI dan Sesjen DPD RI beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).

Indra juga menjelaskan bahwa apabila protokol Covid-19 diterapkan maka akan banyak jumlah kehadiran Anggota DPR, MPR, DPD RI serta tamu undangan yang dikurangi. Tentunya

DPR, MPR, dan DPD RI akan melakukan seleksi ketat bagi orang yang akan diutamakan kehadirannya. Namun Indra mengatakan, untuk saat ini belum ada ketentuan lebih lanjutnya.

“Tentu nanti kita akan melakukan seleksi ketat dan kita akan putuskan mekanismenya seperti apa. Terutama para wartawan yang dalam keadaan normal bisa berkumpul nanti dengan protokol Covid harus melihat skema-skema yang mengikuti aturan yang kami buat nanti,” jelas Indra kebih lanjut.

Sementara itu, Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono menyampaikan bahwa rapat perdana pembahasan penyelenggaraan Agenda Tahunan Negara tersebut berfokus kepada penjadwalan dan evaluasi mengenai dukungan kesekretariatan atas pelaksanaan tahun sebelumnya. Ia berharap bahwa di tahun ini dukungan kesekretariatan dapat lebih totalitas sehingga agenda nanti dapat berjalan lancar.

“Tadi juga dibahas bagaimana kaitan dengan format sidang tahunan yang akan dimulai dengan laporan lembaga negara. Karena dalam 16 Agustus nanti bertepatan dengan hari libur, maka kita akan kembali mengacu kepada UU MD3 dan sedang kami godok mengenai hari pelaksanaan lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait permasalahan waktu ini karena hari ini masih dalam pemikiran-pemikiran,” ucapnya.

Ia mengaku bahwa 3 lembaga legislasi ini akan terus berkoordinasi dalam upaya mensukseskan proses sidang-sidang. Rapat selanjutnya menurut Ma'ruf akan lebih fokus. “Akan lebih terbatas lagi nanti terkait dengan segmen-segmen dukungan yang tentu perlu dimaksimalkan pada saat pelaksanaan (sidang) nanti di Bulan Agustus,” tukasnya. ■ *er/sf*

Setjen DPR Raih Empat Penghargaan PR Indonesia Award 2020

Sekretariat Jenderal DPR RI kembali mendapatkan apresiasi dari ajang penghargaan PR Indonesia Award (PRIA) Tahun 2020 ini. Pada ajang ini, Biro Pemberitaan Parlemen mendapatkan 3 penghargaan, yaitu Bronze Kategori Government PR, Bronze Kategori Sosial Media dan Best Presenter Lembaga yang diraih oleh salah satu Pranata Humas Setjen DPR RI, Leidena Sekar Negari.

Selain itu, lembaga DPR RI juga mendapatkan *The Most Popular in Media Award Category Mainstream Media Monitoring*. Atas dasar itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapari mengungkapkan, prestasi ini diharapkan mampu menjadi pemicu para pegawai di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen untuk dapat meraih prestasi di tahun selanjutnya.

“Semoga capaian kita pada PR Indonesia Award 2020 ini menjadi

pemantik Biro Pemberitaan Parlemen untuk dapat lebih berprestasi lagi di tahun berikutnya,” tutur pria yang akrab disapa Hani itu.

Diketahui, PRIA ini merupakan ajang kompetisi kehumasan atau *public relations* (PR) se-Indonesia. Adapun lebih dari 100 korporasi dan organisasi, terdiri dari kementerian, lembaga, BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, perusahaan daerah, perusahaan swasta, pemerintah provinsi/kota/kabupaten mengikuti kompetisi yang sudah diselenggarakan sejak 2016 ini.

Penyelenggaraan PRIA tahun ini terasa berbeda, karena berlangsung secara daring, mengingat pandemi Covid-19 yang kian meluas. Malam penganugerahan yang semula dijadwalkan di Semarang, 2 April 2020 secara langsung tidak dapat terlaksana. Hal ini mengingat situasi pandemi Covid-19 yang semakin meluas.

“Oleh karena itu, setelah berkoordinasi dengan tuan rumah Pemkot Semarang, kami memutuskan menyelenggarakan PRIA 2020 secara daring, melalui kanal Youtube PR Indonesia Magazine, Senin, 20 April 2020, pukul 16.00 WIB,” ujar Founder dan CEO PR Indonesia Asmono Wikan.

Pada tahun ini, sebanyak 543 entri masuk ke meja panitia. Jumlah ini meningkat ketimbang tahun lalu yang hanya 476 entri. Adapun penjurian sesi presentasi telah berlangsung 3 – 5 Maret 2020. Sedangkan penjurian sesi nonpresentasi dilaksanakan dilaksanakan 23 - 25 Februari 2020. Kedua penjurian dilaksanakan di Jakarta dan melibatkan sekurangnya 13 orang juri, dari kalangan praktisi PR senior, jurnalis terkemuka, akademisi senior, hingga PR Gurus. ■ hs/es



Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Y.O.I Tahapari. Foto: Jaka/MAN

RUU Masyarakat Hukum Adat Harus Diselesaikan

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ali Taher Parasong mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Adat harus segera diselesaikan. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat adat yang terabaikan dalam setiap kehidupan dan pembangunan bangsa negara.

“Saya rasa RUU Masyarakat Hukum Adat ini harus segera

kita rampungkan atau diselesaikan, karena hak-hak mereka itu sangat terabaikan dalam setiap pembangunan bangsa ini,” ujar Ali saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI secara virtual dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rabu (22/4).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan setiap pembangunan yang ada di setiap daerah tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar masyarakat hukum adat. “Menurut saya yang paling penting setiap pembangunan itu tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar masyarakat hukum adat,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) Banten III tersebut.

Lebih lanjut Ali menyampaikan saat ini masih banyak masyarakat adat yang terabaikan. Oleh karena itu AMAN harus tetap melanjutkan pengusulan substansi materi-materi yang ada hingga mendapatkan kepastian hukum jelas. “Saya apresiasikan juga AMAN ini karena sudah berupaya maksimal namun mereka harus tetap melanjutkan pengusulannya secara jelas agar mendapatkan kepastian hukum,” imbuh Ali.

■ tn/sf

”

SAYA RASA RUU MASYARAKAT HUKUM ADAT INI HARUS SEGERA KITA RAMPUNGAN ATAU DISELESAIKAN, KARENA HAK-HAK MEREKA ITU SANGAT TERBAIKAN DALAM SETIAP PEMBANGUNAN BANGSA INI



Anggota Baleg DPR RI Ali Taher. Foto: Eot/AMAN

Webminar BKSAP Hasilkan Poin Penting Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 mendesak setiap individu untuk merubah aspek kehidupannya.

Setiap orang diwajibkan untuk melakukan swakarantina secara sukarela dan menerapkan *social* dan *physical distancing*. Bahkan setiap warga di seluruh dunia sekarang menjadi lebih peduli dengan kebersihan pribadi dan kesehatan daripada sebelumnya. Banyak aktivitas kerja dan agenda rapat yang beralih ke media daring yang menjadikan hal tersebut sebagai rutinitas baru.

Untuk itu, peran Parlemen di panggung internasional menjadi hal yang signifikan dalam memperkuat kontak dan komunikasi bilateral dan multilateral dalam bekerja sama melakukan penanganan dampak virus Covid-19 yang telah menyerang berbagai sektor, baik kesehatan maupun ekonomi dan sosial budaya.

Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dalam sesi paparan web seminar dengan tema "Peran Parlemen Dalam Kerja Sama Internasional Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19", Selasa (21/4). Sebagai persatuan parlemen ASEAN, Fadli menyarankan Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk tidak hanya berfungsi sebagai *platform* bertukar informasi secara reguler atau melakukan *assembly* saja, tetapi juga sebagai pusat informasi Covid-19 di Asia Tenggara dalam penanganan Covid-19 serta dampak terkaitnya.

"Saya juga ingin menyarankan agar kontak dan komunikasi rutin tetap terjalin baik itu dengan Kantor Perwakilan WHO Indonesia dengan BKSAP DPR RI, sebagai sarana untuk mengembangkan pusat Myths-Buster dalam parlemen termasuk



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto: Abu/MAN

untuk memberikan perkembangan terbaru dari penanganan Covid-19 itu sendiri, termasuk juga dalam hal pengembangan vaksin," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Perwakilan WHO Indonesia Navaratnasamy Paranietharan menyampaikan bahwa potensi sebaran Covid-19 di kawasan Asia Tenggara berpotensi menjadi episentrum baru, jika tidak ada langkah restriktif secara terukur untuk menurunkan kurva sebaran Covid-19 itu sendiri. Selain itu, terdapat area dari kerja sama dunia dalam mengatasi pandemi diantara memastikan rantai pasokan peralatan kesehatan seperti test kits, pengembangan vaksin, hingga pentingnya melakukan tukar informasi.

"Yang paling penting sekarang adalah *sharing best-practice* dan temuan riset dalam situasi kritis seperti sekarang ini. Juga *best-practice* dalam mengontrol sebaran pandemi, seperti dilakukan Korea Selatan sebagai salah satu contoh negara yang

berhasil *manage* pandemi," ungkap Navaratnasamy dalam paparannya.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri telah melakukan berbagai pendekatan bilateral, regional, dan multilateral dalam penanganan Covid-19. Sebagai salah satu negara yang berhasil menekan kurva kasus pandemi virus Covid-19, Ketua Komite Khusus Coronavirus Majelis Korea Selatan Kim Jin Pyo mengatakan setidaknya terdapat tiga pelajaran penting terbukti efektif dilakukan untuk menanggulangi pandemi di Korea Selatan.

"Pertama, pemberlakukan rapid-test dalam skala besar sebagai langkah awal deteksi sebaran virus. Kedua, partisipasi sukarela dari setiap warga untuk mematuhi karantina mandiri dan membatasi segala bentuk aktivitas. Terakhir, kecepatan dan transparansi informasi, salah satunya dengan mengadakan *briefing* sebanyak dua kali setiap harinya," jelasnya. ■ alw/es



**PIMPINAN dan ANGGOTA DPR RI
Serta SEKRETARIAT JENDERAL dan BADAN KEAHLIAN DPR RI**

mengucapkan

**Selamat Hari
KARTINI
2020**



*Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu,
Tapi satu-satunya hal yang benar dapat
menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.*